

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan Pembangunan yang efektif dan efisien. Inspektorat sebagai salah satu lembaga pengawasan internal pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kinerja Keuangan Inspektorat memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:

1) Ekonomis Pengeluaran, apakah pengeluaran yang dilakukan Inspektorat memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. 2) Efisiensi Pengelolaan Keuangan, bagaimana efisiensi dalam penggunaan keuangan Inspektorat. 3) Efektivitas Penggunaan Anggaran, apakah anggaran yang dialokasikan kepada Inspektorat digunakan secara efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi.

Metode *value for money* adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas dari penggunaan anggaran dan sumber daya. Metode ini tidak hanya mengevaluasi apakah hasil yang dicapai sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga apakah hasil tersebut memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Dengan menggunakan metode *value for money*, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa baik

inspektorat mengelola keuangan dan melaksanakan tugas pengawasannya dalam periode tersebut.

Penelitian yang mendukung pernyataan tersebut adalah penelitian oleh L. R. Jackson (2012), K. B. Johnson (2018) dan H. E. Brown (2020) yang menyatakan bahwa metode value for money merupakan alat yang sangat berguna dalam menilai dan meningkatkan pengelolaan keuangan di sektor publik. Value for money memungkinkan evaluasi yang komperhensif terhadap ekonomis, efisiensi dan efektivitas dari penggunaan anggaran dan sumber daya, serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh memberikan nilai optimal bagi masyarakat. Dengan menerapkan metode ini, analisis kinerja keuangan dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan hasil dari pengeluaran publik.

Renyowijiyo (2008:9) menyatakan bahwa penerapan value for money pada organisasi sektor publik memiliki beberapa keuntungan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dana publik untuk akuntabilitas, meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, serta menurunkan biaya pelayanan publik melalui efisiensi dan penghematan masukan.

*Value for money* menurut Mardiasmo (2018:142) merupakan konsep manajemen yang dibangun berdasarkan prinsip keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Membeli input dengan harga terbaik dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas tertentu dikenal sebagai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berkaitan dengan bagaimana organisasi sektor publik dapat mengurangi jumlah sumber

daya input yang mereka konsumsi untuk mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Efisiensi adalah kemampuan untuk memaksimalkan keluaran dari masukan tertentu atau menggunakan masukan dalam jumlah paling sedikit untuk menghasilkan hasil tertentu. Efektivitas adalah sejauh mana hasil atau tujuan program tercapai. Efektivitas dapat ditentukan sebagai rasio keluaran terhadap hasil.

Inspektorat merupakan lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai unsur pelaksanaan tugas dan kegiatan. Dalam kesempatan ini, penyidik mendalami kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Manggarai. Salah satu entitas sektor publik di Kecamatan Langke Rembong yang masih menjadi bagian dari Kota Ruteng adalah Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sebagai lembaga pemeriksa pemerintah, Inspektorat Kabupaten Manggarai diharapkan dapat menjadi standar bagi lembaga pengelola di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai, khususnya di bidang pengelolaan keuangan. Penting untuk memahami kinerja lembaga keuangan di bawah Inspektorat Kabupaten Manggarai karena informasi tersebut dapat menjadi tolak ukur pencapaian akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan dana yang diperlukan untuk merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020–2022.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai (*input value dan input*)**  
**Tahun Anggaran 2020-2022**

| No | Uraian Kegiatan                                | Tahun 2020           |                      | Tahun 2021           |                      | Tahun 2022           |                      |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |  | <i>Input Value</i>   | <i>Input</i>         | <i>Input Value</i>   | <i>Input</i>         | <i>Input Value</i>   | <i>Input</i>         |
| 1. | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 1.425.117.950        | 1.400.000.000        | 1.399.000.000        | 1.300.000.000        | 1.440.000.000        | 1.310.000.000        |
| 2. | Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda | 131.593.150          | 130.000.000          | 130.500.000          | 129.980.500          | 129.000.000          | 110.000.000          |
| 3. | Inventarisasi temuan pengawasan                | 32.897.670           | 31.750.000           | -                    | -                    | 30.000.000           | 28.250.000           |
| 4. | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan          | 114.997.670          | 113.895.670          | 113.990.000          | 112.150.000          | 112.990.000          | 110.910.000          |
| 5. | Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif  | 62.975.200           | 60.590.000           | 61.235.000           | 60.124.000           | 60.000.000           | 58.980.000           |
| 6. | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan       | 148.321.240          | 147.590.000          | 146.300.000          | 145.350.000          | 144.670.000          | 142.453.000          |
|    | <b>Total</b>                                   | <b>1.914.902.880</b> | <b>1.883.827.670</b> | <b>1.851.025.000</b> | <b>1.747.604.500</b> | <b>1.916.660.000</b> | <b>1.760.593.000</b> |

*Sumber: LKIP Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai*

Pada tabel 1.1 menjelaskan standar dan realisasi penggunaan anggaran. Tabel ini penting untuk memberikan gambaran awal mengenai perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan yang direalisasikan, yang merupakan langkah awal dalam menganalisis ekonomis, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai (*output dan input*)**  
**Tahun Anggaran 2020-2022**

| No | Uraian Kegiatan                                | Tahun 2020    |               | Tahun 2021    |              | Tahun 2022    |              |
|----|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|    |  | <i>Output</i> | <i>Input</i>  | <i>Output</i> | <i>Input</i> | <i>Output</i> | <i>Input</i> |
| 1. | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 100%          | 98,23%        | 100%          | 92,92%       | 100%          | 90,97%       |
| 2. | Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda | 100%          | 98,78%        | 100%          | 99,60%       | 100%          | 85,27%       |
| 3. | Inventarisasi temuan pengawasan                | 100%          | 96,51%        | -             | -            | 100%          | 94,16%       |
| 4. | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan          | 100%          | 99,04%        | 100%          | 98,38%       | 100%          | 98,15%       |
| 5. | Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif  | 100%          | 96,21%        | 100%          | 98,18%       | 100%          | 98,3%        |
| 6. | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan       | 100%          | 99,50%        | 100%          | 99,35%       | 100%          | 98,46%       |
|    | <b>Total</b>                                   | <b>100%</b>   | <b>98,37%</b> | 100%          | 94,41%       | 100%          | 91,85%       |

*Sumber: LKIP Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai*

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa input merupakan sumber daya yang digunakan dalam proses operasional sedangkan output merupakan hasil akhir dari proses penggunaan input.

**Tabel 1.3**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai (*outcome dan output*)**  
**Tahun Anggaran 2020-2022**

| No | Uraian Kegiatan                                | Tahun 2020     |               | Tahun 2021     |               | Tahun 2022     |               |
|----|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|    |  | <i>Outcome</i> | <i>Output</i> | <i>Outcome</i> | <i>Output</i> | <i>Outcome</i> | <i>Output</i> |
| 1. | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 5<br>Laporan   | 5<br>Laporan  | 4<br>Laporan   | 4<br>Laporan  | 2<br>Laporan   | 2<br>Laporan  |
| 2. | Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda | 6<br>Laporan   | 6<br>Laporan  | 3<br>Laporan   | 3<br>Laporan  | 5<br>Laporan   | 5<br>Laporan  |
| 3. | Inventarisasi temuan pengawasan                | 3<br>Laporan   | 3<br>Laporan  | -              | -             | 3<br>Laporan   | 3<br>Laporan  |
| 4. | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan          | 3<br>Laporan   | 3<br>Laporan  | 2<br>Laporan   | 2<br>Laporan  | 3<br>Laporan   | 3<br>Laporan  |
| 5. | Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif  | 4<br>Laporan   | 4<br>Laporan  | 5<br>Laporan   | 5<br>Laporan  | 5<br>Laporan   | 5<br>Laporan  |
| 6. | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan       | 3<br>Laporan   | 3<br>Laporan  | 2<br>Laporan   | 2<br>Laporan  | 3<br>Laporan   | 3<br>Laporan  |

*Sumber: LKIP Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai*

Pada tabel 1.3 menjelaskan bahwa hubungan antara *output* dan *outcome* yang menunjukkan proses penggunaan sumber daya dan dampak atau hasil dari penggunaan *output* tersebut.

Jika dilihat dari semua program kegiatan penyelenggaraan pengawasan tidak semua kegiatan dijalankan sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan ada kegiatan yang tidak dijalankan. Pada tahun 2021 program penyelenggaraan pengawasan untuk kegiatan inventarisasi temuan pengawasan tidak diadakan, hal ini menunjukkan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak mampu menjalankan kegiatan dengan menggunakan dana yang ada. Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan yang tidak diadakan dapat mengganggu fungsi pengawasan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan potensi temuan dan masalah tidak teridentifikasi dan diatasi, yang berisiko terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020-2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2020–2022 yang diukur dengan pendekatan *Value for Money*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kinerja keuangan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020-2022 dengan menggunakan pendekatan *Value for Money*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konteks yang lebih ilmiah dalam mengevaluasi kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for Money*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka sebagai pengetahuan khususnya dalam hal mengevaluasi kinerja keuangan dengan pendekatan *Value For Money*.

#### b. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian dengan topik sejenis.

#### c. Bagi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai pedoman dan informasi untuk meningkatkan praktik pengelolaan keuangan.